

## Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Baubau

Hasnawati <sup>1\*</sup>, Syahril Ramadhan <sup>2</sup>, La Ode Syaiful Islamy H. <sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

\* Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

**Kata kunci:** efektivitas program, *stunting*, ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program

**Keywords:** *program effectiveness, stunting, target accuracy, program outreach, program objectives, program monitoring*

### PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin,  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,  
Kode Pos 93721 Baubau,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Email: [journaladm2110@gmail.com](mailto:journaladm2110@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan *stunting* di Kota Baubau, dengan menggunakan indikator efektivitas program berupa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* yang kemudian ditetapkan sebanyak 6 (enam) orang. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Kota Baubau melalui program intervensi gizi sensitif berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program disimpulkan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Kota Baubau mencegah terjadinya kasus *stunting* baru sebagaimana tujuan program intervensi gizi sensitif yang menjadi fokus penelitian ini yakni meminimalisir atau sebagai tindakan pencegahan sejak dini terhadap resiko *stunting*. Meskipun demikian, dari aspek capaian organisasi pelaksana program intervensi gizi sensitif masih terdapat beberapa program intervensi gizi sensitif yang masih perlu ditingkatkan yaitu akses air minum dan sanitasi, kuota masyarakat penerima manfaat PKH, dan pembentukan kelompok masyarakat tani. Selain itu, perlu ada penyamaan persepsi antar organisasi pemerintah daerah pelaksana program intervensi gizi sensitif mengenai sasaran program yang dilaksanakan. Juga perlu adanya upaya penguatan atau pemberdayaan aspek social ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok miskin dan rentang.

*This study aims to determine and describe the effectiveness of a nutrition intervention program that is sensitive to the acceleration of stunting reduction in Baubau City, using program effectiveness indicators in the form of program targeting accuracy, program outreach, program objectives and program monitoring. This study uses a qualitative descriptive research method, through interviews, observation and documentation. The research uses primary data and secondary data obtained through interviews, observation and documentation. Informants were determined using a purposive sampling method which was then determined as many as 6 (six) people. Data analysis was carried out by collecting data, presenting data, reducing and drawing conclusions. The results of the research show that the effectiveness of the program to accelerate stunting reduction in Baubau City through a sensitive nutrition intervention program based on indicators of accuracy of program targets, program outreach, achievement of program objectives and program monitoring is concluded to have run effectively. This is marked by the success of the Baubau City Government in preventing the occurrence of new stunting cases as the aim of the sensitive nutrition intervention program which is the focus of this research is to minimize or act as an early preventive measure against the risk of stunting. However, from the aspect of the achievements of organizations implementing sensitive nutrition intervention programs, there are still several sensitive nutrition intervention programs that still need to be improved, namely access to drinking water and sanitation, quotas for PKH beneficiary communities, and the formation of farming community groups. Apart from that, there needs to be a common perception between local government organizations implementing sensitive nutrition intervention programs regarding the targets of the programs being implemented. There is also a need for efforts to strengthen or empower the socio-economic aspects of society, especially for poor and low-income groups.*

## PENDAHULUAN

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan suatu program dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana, sasaran yang tepat, peralatan dan perlengkapan yang menunjang. Oleh sebab itu efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas program percepatan penurunan stunting dapat menjadikan tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan kesehatan. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Sama halnya dengan program penanganan stunting, dapat dikatakan efektif apabila dapat mencegah stunting itu sendiri.

Terdapat 2 (dua) program percepatan penurunan stunting yakni melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. bahwa sasaran intervensi gizi sensitif adalah pada masyarakat atau keluarga. Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Khusus intervensi gizi sensitif berikut program yang dilakukan beserta organisasi perangkat daerah sebagai berikut: a) Penyediaan akses sanitasi dan akses air minum yang layak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); b) Konseling gizi dan bina keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB); c) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; d) Program perlindungan sosial oleh Dinas Sosial; e) Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan; f) Gerakan makan ikan (Gemari) oleh Dinas Perikanan; g) Penyebaran informasi pencegahan stunting oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo); dan h) Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan dokumen akta kelahiran anak usia 0 sampai 24 bulan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Berikutnya, Budiani (2007) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas suatu program, yaitu: 1) Ketepatan Sasaran Program, yaitu Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya; 2) Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya; 3) Tujuan Program, yaitu Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 4) Pemantauan Program, yaitu Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program intervensi gizi sensitif yang dilakukan sudah tepat sasaran sesuai tupoksi masing-masing OPD terkait, sudah dilakukan sosialisasi. Tujuan program juga sudah dinikmati atau sudah diterima oleh masyarakat dan pemantauan program juga sudah dilakukan seperti melalui kegiatan rapat.

Namun demikian peneliti menilai bahwa semua hal tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih ilmiah terkait efektivitas program tersebut. Di luar itu juga, peneliti menganggap bahwa besarnya perhatian pemerintah pusat dan khususnya Kota Baubau untuk mempercepat penurunan *stunting* ini sedangkan sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian yang sama di kota Baubau. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Baubau”. Peneliti berkeyakinan bahwa kajian ini sangat penting untuk mendapatkan manfaat bagi pelaksana kebijakan yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting* ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas program dikatakan sebagai sebuah upaya atau tolak ukur dalam melihat sejauh mana sebuah program berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas digunakan sebagai acuan dalam melihat sejauh mana proses yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai dari program tersebut. Sebuah program yang menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa proses dari program tersebut berjalan secara efektif, adapun sebaliknya apabila output dari sebuah program tidak sesuai dengan tujuan maka program tersebut tidak berjalan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu program yang efektif apabila proses yang meliputi usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan dari program itu tercapai.

Menurut Budiani (2007), disebutkan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan perbandingan indikator menurut para ahli di atas peneliti mengambil indikator menurut Budiani karena indikator tersebut lebih relevan dengan masalah yang ada di lapangan. Pendapat Budiani (2007), yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program, yaitu Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
3. Tujuan Program, yaitu Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
4. Pemantauan Program, yaitu Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Selain itu, menurut Handayani dan Rivani (2007) Efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila realisasi program 1 persen sampai dengan 50 persen dari target termasuk dalam efektivitas rendah, dan apabila realisasi program antara 51 sampai 100 persen dari target termasuk efektivitas tinggi. Pengukuran efektivitas menggunakan standar sesuai acuan Keputusan Menpan No. Kep./25/M/Men Pan/2/2004 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Standar Pengukuran Efektivitas

Besar Nilai Efektivitas	Nilai Interpretasi Efektivitas
90% - 100 %	Efektif
80% - 89 %	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menpan No. Kep./25/25/M/Men Pan/2/2004

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Hal ini karena efektivitas program percepatan penurunan stunting Kota Baubau memerlukan pemahaman secara mendalam dan

menyeluruh dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Metode kualitatif dapat mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program percepatan penurunan stunting Kota Baubau. Penelitian ini dilaksanakan mulai Februari hingga Mei 2023. Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen yang kunci yang mengatur dan mengendalikan seluruh tahapan penelitian. Peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengumpulan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan yang ditunjuk adalah orang yang terlibat langsung dan benar-benar memahami tentang obyek penelitian (Sugiyono, 2009). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilanjutkan dengan proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terakhir, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam upaya menjaga keabsahan data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah kesesuaian penerima manfaat program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan *stunting* dengan sasaran program yang sudah ditetapkan yaitu masyarakat atau keluarga berisiko *stunting* di Kota Baubau.

Berdasarkan wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa program sasaran intervensi gizi sensitif ini dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang kemudian diikuti dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Percepatan penurunan *Stunting* Terintegrasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sasaran intervensi gizi sensitif adalah pada masyarakat atau keluarga. Sebelumnya pada pasal 5 (3) juga disebutkan bahwa program intervensi yang dilakukan beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

- a) Penyediaan akses sanitasi dan akses air minum yang layak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- b) Konseling gizi dan bina keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB);
- c) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d) Program perlindungan sosial oleh Dinas Sosial
- e) Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- f) Gerakan makan ikan (Gemari) oleh Dinas Perikanan;
- g) Penyebaran informasi pencegahan *stunting* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- h) Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan dokumen akta kelahiran anak usia 0 sampai 24 bulan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Tugas-tugas OPD tersebut di atas selanjutnya akan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran program kegiatan yang melekat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang besarnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran Kota Baubau. Informan menjelaskan bahwa program *stunting* sudah menjadi salah satu prioritas daerah. Sesuai tupoksi Bappeda sebagai wakil ketua tim koordinasi percepatan penanganan *stunting* sasarannya adalah OPD terkait antara lain; Dinkes, DPPKB, PUPR, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kemenag dan Tapem. Bappeda memastikan terlaksananya program intervensi terkait *stunting*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengetahui bahwa walaupun merujuk pada satu peraturan yang sama, dan juga dengan tujuan percepatan penurunan *stunting*, dalam pelaksanaan intervensi para OPD yang terlibat memiliki pemahaman yang berbeda. Perbedaan pemahaman ini tampak dalam sasaran kegiatan sebagai wujud pelaksanaan program intervensi.

Program intervensi Dinas PUPR Kota Baubau dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem air limbah adalah satu dari beberapa kegiatan wajib yang sudah melekat dalam tupoksi Dinas PUPR. Setiap tahun dinas PUPR akan

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan lokasi kegiatannya tidak berdasar pada daerah lokus stunting saja, tetapi juga memperhatikan urgensi dan tingkat ketersediaan fasilitas yang sudah terbangun di daerah tersebut.

Meskipun demikian, nampak bahwa Dinas PUPR tetap berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Baubau. Hal ini tampak dalam kegiatan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Kelurahan Baadia T.A 2021; Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah Kelurahan Palabusa T.A 2022; Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah Kelurahan Sukanayo T.A 2023; dan Pembangunan tangki septik skala individual Kelurahan Tomba T.A. 2022". Semua lokasi pembangunan tersebut sesuai dengan kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting Kota Baubau Tahun 2022 yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 601 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelurahan Prioritas Pencegahan Stunting Kota Baubau Tahun 2022 ditetapkan kelurahan prioritas yakni Labalawa, Kempeonaho, Tampuna, Palabusa, Waborobo, Sukanayo, Katobengke, Kantalai, Kolese, Kalialia, Liwuto, Lowu-lowu, Lipu, Sulaa dan Tomba.

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Baubau melakukan program intervensi diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program nasional. Sasaran program ini tidak berdasar pada data masyarakat keluarga berisiko stunting yang dikeluarkan DPPKB, melainkan bersumber data aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinput oleh masing-masing operator dalam DTKS yang tersebar di seluruh kelurahan. Program tersebut memiliki indikator tersendiri seperti memiliki minimal salah 1 kategori berikut: ibu hamil, bayi/balita, anak usia dini, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA), dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sasaran program ini bersumber data aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinput oleh masing-masing operator dalam DTKS yang tersebar di seluruh kelurahan.

Akibat adanya perbedaan sumber data dan prioritas sasaran program, Dinas Sosial hingga kini belum dapat memastikan berapa persen masyarakat berisiko stunting yang sudah tercover dalam program jaminan sosial tersebut. Walaupun Dinas Sosial Kota Baubau tetap berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kelurahan untuk memprioritaskan masyarakat miskin dan layak dibantu karena mereka adalah kelompok yang sangat rentan terhadap resiko stunting. Tetapi peneliti dapat menilai bahwa lamanya kurun waktu penyelesaian pemilahan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial dari tahun 2021 sejak Keputusan Walikota tentang Percepatan Pencegahan Stunting diterbitkan hingga menjelang pertengahan 2023 menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menangani persoalan stunting dan walaupun syarat penerima PKH memiliki kesamaan dengan indikator keluarga berisiko stunting tetapi PKH memperhitungkan kondisi lingkungan ekonomi keluarga sedangkan penetapan status keluarga berisiko stunting tidak memperhatikan hal tersebut. Padahal menurut peneliti sanding data ini adalah tahapan yang sangat urgen untuk dilakukan, mengantisipasi adanya masyarakat dengan status kurang mampu dan juga berisiko *stunting*.

Seperti OPD lainnya, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sasaran program intervensi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga tidak berdasar pada status masyarakat atau keluarga berisiko stunting. Bentuk intervensi gizi sensitif adalah kegiatan pembinaan kelompok pemanfaatan pekarangan; Memastikan ketersediaan dan pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat; dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kawasan mandiri pangan". Program ini menyasar wilayah yang masyarakatnya memiliki pekarangan rumah. Program ini sudah terlaksana di beberapa wilayah di Kota Baubau seperti di Gonda, Kadolokatapi, Karya Baru, Palabusa dan bagian Lipu. pekarangannya yang bisa dipakai untuk menanam. Sedangkan pada daerah perkotaan dengan aktivitas masyarakat yang dominan pedagang dengan halaman rumah yang sempit tidak dapat dilakukan intervensi meskipun berstatus keluarga berisiko stunting.

Berbeda dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, OPD DPPKB dan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa sasaran intervensi yang mereka lakukan adalah menjurus kepada masyarakat atau keluarga berisiko *stunting*. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa DPPKB melaksanakan program intervensi gizi sensitif dengan melaksanakan intervensi konseling gizi dan bina keluarga dilakukan melalui kegiatan pendataan sasaran program keluarga berisiko *stunting*; Melakukan pemetaan kasus keluarga berisiko *stunting*; dan Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) berisiko *stunting*.

Terkait TPK, dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2022 Pasal 1 disebutkan bahwa "Tim pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari bidan, kader TP PKK, dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan, dan fasilitasi program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting*. Pendataan sasaran program keluarga berisiko *stunting* dilakukan oleh Kader DPPKB yang jumlahnya sebanyak 315 orang tersebar di 8 kecamatan, 43 kelurahan di Kota Baubau. Pendataan keluarga berisiko *stunting* ini ditetapkan berdasarkan indikator ada atau tidaknya anggota keluarga ibu hamil, ibu nifas, baduta, balita dan remaja putri yang belum menikah. Apabila dalam keluarga tersebut ada salah satu diantara indikator tersebut maka keluarga itu berstatus keluarga berisiko *stunting*. Setelah data terkumpul maka dilakukan pemetaan yang kemudian diikuti dengan pembentukan TPK yang juga tersebar di 8 kecamatan, 43 kelurahan di Kota Baubau sebagaimana kader DPPKB. TPK ini bertugas untuk memberikan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi pada keluarga berisiko *stunting* tersebut.

Informasi ini menunjukkan bahwa intervensi melalui pendataan dan pemetaan dapat tepat sasaran karena dilakukan oleh kader DPPKB yang selain berkompeten, mereka juga diberikan indikator pendataan yang jelas dan tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Baubau. Selain itu informan juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya para TPK bekerja sama atau bergabung dalam kegiatan posyandu yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan. Disitu ada meja untuk nakes dan juga para TPK. Dan rata-rata masyarakat yang datang ke puskesmas pasti terkategori berisiko *stunting*. Disitu para kader TPK memberikan edukasi atau sosialisasi terkait gizi atau hal-hal lainnya terkait pencegahan *stunting*. Dinas Kesehatan juga melaksanakan Intervensi dalam berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi TTD Rematri di Sekolah, validasi kasus masalah gizi; dan *review* kinerja integrasi *stunting*. Sasaran program kepada Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Remaja Putri atau Rematri. Program ini sudah menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh petugas dan kader kesehatan dalam kegiatan posyandu di puskesmas minimal sebanyak 10 kali dalam setiap puskesmas yang tersebar di Kota Baubau. Dalam kegiatan tersebut berbagai kegiatan penanganan seperti imunisasi dan lainnya. Dengan demikian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan telah tepat sasaran.

Namun demikian, mengamati salah satu pelaksanaan posyandu di Puskesmas Bukit Wolio Indah dan di situ tampak bahwa para kader dengan aktif memberikan edukasi dan sosialisasi sebagaimana tugas yang diembannya. Akan tetapi di situ ada masyarakat yang tampak serius mencermati apa yang disampaikan oleh para kader tetapi ada juga yang seperti acuh. Hal ini sebagaimana temuan penelitian Islamy, dkk. (2023) bahwa respon kelompok sasaran program akan sangat berpengaruh pada bagaimana capaian program tersebut. Dalam program intervensi *stunting* terdapat dua respon yang akan di dapatkan yaitu respon positif dan respon negatif.

Dari keseluruhan uraian di atas, tampak perbedaan sasaran intervensi dalam pelaksanaan program di tiap-tiap OPD yang terlibat bahwa sasaran intervensi yang dilakukan. OPD lainnya lebih pada masyarakat secara umum, sedangkan DPPKB dan Dinas Kesehatan, sasaran mereka lebih spesifik menjurus pada keluarga yang berisiko *stunting* yakni ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan calon pengantin/calon pasangan usia subur (remaja). Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa sasaran program yang sudah ditetapkan perlu ditelaah

kembali. Hal ini sebagaimana pendapat Islamy, dkk. (2022) bahwa suatu kebijakan tidaklah memiliki arti penting tanpa disertai dengan adanya upaya nyata yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program sebagai rencana komprehensif harus menggambarkan kejelasan sasaran yang hendak dicapai sehingga pelaksana tidak multitafsir atau program tersebut.

Demikian pula dengan pendapat Gibson (1997) dalam Syahrir (2022) bahwa efektivitas organisasi harus diawali dengan adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai sehingga akan memberikan kemudahan bagi organisasi dan bagian-bagiannya untuk menentukan strategi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak terkecuali untuk efektivitas program, karena program adalah bagian dari upaya pencapaian tujuan organisasi.

Perbedaan penafsiran yang terjadi, dimana awalnya DPPKB mengeluarkan data keluarga berisiko stunting. Bagi Dinas Kesehatan, data tersebut akan menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai intervensi. Lain halnya dengan OPD lainnya. Misalnya, Dinas PUPR dalam membangun akses air minum dan sanitasi tidak berfokus pada masyarakat berstatus keluarga berisiko stunting, melainkan semua masyarakat. Berikutnya, Dinas Sosial misalnya memberikan bantuan PKH ataupun lainnya dengan standarnya masing-masing, hal paling utama adalah masyarakat tersebut berkategori miskin atau tidak mampu. Sedangkan dalam penentuan masyarakat berisiko stunting, miskin atau kaya tidak menjadi suatu indikator. Perbedaan ini tentu juga berdampak pada penerima intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kemudian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam membentuk kelompok masyarakat tani sebagai bentuk pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) juga tidak berdasar pada status keluarga apakah berisiko stunting atau tidak. Melainkan pada masyarakat yang memiliki kesiapan utamanya lahan/pekarangan rumah.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa ke depan standar atau indikator penentuan masyarakat dengan status keluarga berisiko stunting yang dikeluarkan oleh DPPKB harus mempertimbangkan kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis dan kondisi ini sangat rentang terjadi pada masyarakat atau keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kebanyakan dari mereka makan adalah untuk bertahan hidup, kualitas dan kandungan gizi dalam makanan bukanlah sesuatu yang begitu diperhitungkan. Sekalipun mereka tahu bahwa itu penting, kekurangan ekonomi membatasi pilihan mereka. Ketika sakit mereka juga lebih memilih pengobatan alternatif, meminum ramuan tradisional atau lain sebagainya. Datang ke fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk sekedar kontrol saja sangatlah jarang. Selain karena perhitungan biaya, bahkan sekedar biaya perjalanan, mereka selalu menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah.

Tentu semua kondisi tersebut sangat berbeda dengan masyarakat berpenghasilan tinggi atau ekonomi menengah ke atas. Mereka ini memiliki akses yang luas untuk mendapatkan pangan bergizi. Mereka makan untuk tetap sehat, mereka memiliki banyak pilihan untuk mengonsumsi pangan bergizi. Mereka juga memiliki pemahaman dan kesempatan yang luas untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik.

Dengan demikian, diharapkan ke depan data masyarakat berisiko *stunting* adalah data masyarakat yang tidak hanya memenuhi indikator dari sisi kesehatan tetapi juga secara ekonomi. Manfaatnya adalah *pertama* data masyarakat berisiko *stunting* pasti akan menjadi menurun, karena masyarakat yang sebelumnya hanya memenuhi indikator dari sisi kesehatan (tanpa peduli pada sisi ekonomi) akan dikeluarkan dari data masyarakat berisiko *stunting*. Asumsinya adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas memiliki kualitas hunian dengan akses air minum dan sanitasi yang baik. Mereka juga memiliki akses yang luas terhadap pangan bergizi dan juga fasilitas kesehatan yang baik sehingga tidak menjadi prioritas intervensi. Mereka bisa mengintervensi atau mencegah diri atau keluarga mereka sendiri dari risiko *stunting*. *Ke dua*, menurunnya jumlah data masyarakat atau keluarga berisiko *stunting* tersebut akan memudahkan Dinas Kesehatan dalam memilah data masyarakat untuk selanjutnya diintervensi. *Ke tiga*, sasaran program perlindungan sosial akan otomatis mengarah ke masyarakat berisiko *stunting*.

Hal ini tentu akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh pemerintah.

## **2. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program adalah adalah penyampaian informasi terkait program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting kepada masyarakat atau keluarga berisiko stunting di Kota Baubau. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Komunikasi setiap OPD yang dalam melaksanakan program-program intervensinya dalam usahanya untuk mempercepat penurunan stunting, tentunya tidak hanya terletak kepada para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Baubau sebagai sasaran program, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Terkait pelaksanaan sosialisasi program, hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa sosialisasi program intervensi yang dilaksanakan oleh setiap OPD yang terlibat. Dinas PUPR melakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder di kelurahan bersama masyarakat; dan juga membentuk/menunjuk beberapa orang untuk menjadi Fasilitator Lapangan di kelurahan-kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan program. Dinas DPPKB melakukan sosialisasi dalam kegiatan Rembuk stunting tingkat Kota Baubau dengan menghadirkan Tim OPD terkait yang masuk dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting. Sosialisasi juga dilakukan dalam kegiatan mini Lokakarya tingkat Kelurahan dan Kecamatan dan kegiatan Audit status stunting yang dilakukan dengan turun langsung di lapangan melibatkan tim DPPKB, Dinas Kesehatan dan TPK. Untuk kemudian hasilnya diserahkan ke tim ahli untuk mendapatkan RTL aksi stunting. Selain itu informan DM juga mengungkapkan bahwa sosialisasi oleh DPPKB juga dilaksanakan pada kegiatan posyandu bersama dinas kesehatan. Sosialisasi langsung dilakukan secara face to face dengan masyarakat. Misalnya ada ibu hamil, maka petugas DPPKB akan mengajukan beberapa pertanyaan menanyakan beberapa hal misalnya anak ke berapa. Jika ibu itu menjawab anak ke 2 atau ke 3 maka akan dihimbau untuk menggunakan alat kontrasepsi, dan banyak hal lainnya yang intinya adalah untuk menjaga dan meminimalisir risiko stunting. Selain itu proses sosialisasi ini juga ternyata dilakukan oleh DPPKB bersamaan dengan kegiatan posyandu. Sehingga tampak bahwa dalam proses sosialisasi program intervensi juga dilakukan secara terintegrasi.

Berikutnya, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait stunting melalui kegiatan publikasi stunting, rembuk stunting, sosialisasi stunting di kecamatan, kelurahan, posyandu, sekolah dan juga rapat koordinasi lintas OPD terkait. Selain itu juga proses sosialisasi menjadi semakin masif dilakukan dengan keterlibatan Dinas Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab dalam sosialisasi stunting baik melalui media online maupun media cetak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak hanya sebatas pada penyampaian materi melainkan juga dengan wujud tindakan langsung seperti kegiatan sosialisasi ke sekolah dengan sasaran remaja putri. Petugas kesehatan didampingi petugas gizi memberikan Tablet Tambah Darah kepada remaja putri. Tablet ini dianjurkan untuk langsung diminum di hadapan petugas dengan catatan bahwa rematri tersebut telah terlebih dahulu sarapan. Selain itu informan, YA memberikan informasi bahwa Dinas Kesehatan, melalui perantara puskesmas rutin melakukan kelas ibu hamil. Kelas ini menjadi wadah bagi petugas kesehatan memberikan berbagai pemahaman terkait stunting kepada para calon ibu, utamanya terkait urgensi 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Sosialisasi program intervensi oleh Dinas Sosial dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan dan kelurahan yang bertujuan untuk memastikan keluarga pra sejahtera terinput dalam aplikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sesuai indikator yang sudah ditetapkan, misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan. Setelah terinput, diadakan musyawarah tingkat kelurahan dan dimuat



dalam Berita Acara. Tahap selanjutnya Berita Acara tersebut disetor ke Dinas Sosial dan dimasukkan dalam aplikasi SIS-NG. Data yang sudah terinput tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada para penerima manfaat program.

Sosialisasi program juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk sosialisasi pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L) yang sudah dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. P2L ini adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan-lahan pekarangan rumah oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan secara berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2022. Selanjutnya, Bappeda berperan dalam mensosialisasikan dan memastikan saja bahwa program intervensi stunting sudah masuk dalam Renja OPD sesuai fungsinya termasuk perencanaan dan penganggaran termasuk kelurahan melalui dana kelurahan.

Pelaksanaan sosialisasi adalah bentuk kesadaran pemerintah dalam hal ini TPPS dalam usahanya untuk mempercepat penurunan stunting yang tentunya tidak hanya terletak kepada para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Baubau baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat Kota Baubau merupakan objek utama dari pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting, khususnya pada intervensi gizi sensitif sebagai bahasan penelitian ini.

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan rapat-rapat lintas OPD menunjukkan bahwa pelaksanaan program intervensi gizi sensitif dibangun dengan koordinasi. Van metter dan Van Horn dalam Subarsono (2003), Islamy,dkk. (2023) menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diharapkan. Namun selain itu Karena Van Meter dan Varn Horn menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sebuah program sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, termasuk di dalamnya adalah kondisi ekonomi maka sosialisasi dan berbagai kampanye terkait pencegahan dan bahaya *stunting* tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pencegahan *stunting*.

Hal ini kembali lagi karena *stunting* sangat terkait erat dengan kualitas hunian dan kualitas pangan masyarakat. Pemerintah juga tidak bisa hanya mengandalkan program intervensi gizi sensitif yang kini tengah dijalankan. Dalam jangka panjang, pemerintah tidak boleh terus berperan sebagai aktor utama pencegahan *stunting*, karena sepanjang kemiskinan dan kesulitan ekonomi masih menjadi warna dominan dalam kehidupan masyarakat, maka hanya persoalan waktu untuk menunggu munculnya kasus *stunting* baru. Untuk itu, masyarakat harus diberdayakan secara ekonomi. Selain menjalankan berbagai program intervensi pencegahan *stunting*, pemerintah juga harus mengupayakan kebijakan dan program yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan aspek ekonomi masyarakat, akan mendorong peningkatan kualitas hunian dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Artinya masyarakat sudah mampu mengintervensi diri dan keluarga mereka sendiri dari risiko *stunting*. Oleh karena itu untuk mendukung sosialisasi yang sudah dijalankan dengan baik, pemerintah juga harus mulai meningkatkan aspek lingkungan masyarakat, khususnya lingkungan ekonomi masyarakat.

### **3. Pencapaian Tujuan Program**

Pencapaian tujuan program adalah kesesuaian antara hasil pelaksanaan program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting dengan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Baubau. Intervensi gizi sensitif dilakukan untuk meminimalisir atau sebagai tindakan pencegahan sejak dini terhadap risiko stunting.

Terkait pencapaian tujuan program tersebut, hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa hingga saat ini peningkatan akses air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Baubau dalam kaitannya dengan program intervensi gizi sensitif belum memenuhi

kebutuhan. Pertama pada akses air minum beberapa permasalahan teknis yang menjadi kendala diantaranya seperti: 1) Masih rendahnya Pendanaan Sektor Air Minum dari APBD Kota; 2) Pertumbuhan pemukiman semakin pesat sehingga semakin banyak pula kebutuhan air minum; 3) Pengelolaan SPAM oleh PDAM Kota Baubau belum memadai dimana pemasangan sambungan rumah tidak mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas produksi PDAM atau Idle Capacity sehingga distribusi ke sambungan rumah masih bergilir; Pemasangan sambungan rumah tidak mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas produksi PDAM atau Idle Capacity, sehingga distribusi ke sambungan rumah masih bergilir.

Sedangkan permasalahan bidang sanitasi adalah beberapa permasalahan teknis yaitu : 1) rendahnya Pendanaan Sanitasi Sektor Air limbah Domestik dari APBD Kota; 2) Tangki Septik yang dibangun oleh Warga maupun Developer belum sesuai spesifikasi Teknik/Tidak Kedap Air; 3) Teridentifikasi jumlah jamban yang belum layak, belum memiliki tangki septik dan berpotensi mencemari air tanah sebesar 69,60%; dan 4) Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat kelompok pemelihara infrastruktur IPAL /Tangki Septik Komunal.

Dari informasi yang disampaikan di atas, tampak bahwa persoalan air minum dan sanitasi yang layak di Kota Baubau masih perlu ditingkatkan baik dari sektor alokasi anggaran maupun kapasitas lembaga-lembaga teknis yang menangani hal tersebut. Pengawasan dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan sehingga mendorong kesadaran semua pihak baik para developer yang bergerak di bidang perumahan maupun masyarakat secara umumnya.

Islamy, dkk. (2023) menjelaskan bahwa dalam setiap proses pelaksanaan program kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Van Meter dan Varn Horn dalam Islamy (2023) disebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Masih terkait pencapaian tujuan program intervensi yang dilaksanakan oleh OPD, program perlindungan sosial oleh Dinas Sosial yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi semua warga negara, dalam hal ini masyarakat miskin dan rentang dari sisi ekonomi. Pemutakhiran data terus dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan penerima manfaat dan sejauh ini pelaksanaan program intervensi juga terus berjalan dan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan dapat diterima oleh setiap masyarakat penerima.

Pencapaian tujuan program P2L yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah berhasil membentuk 14 kelompok tani dalam rangka penguatan ketersediaan pangan, penguatan aksesibilitas pangan dan penguatan pemanfaatan pangan diantaranya di Kelurahan Gonda, Kadolokatapi, Karya Baru, Palabusa dan Lipu. Kelompok yang sudah terbentuk tersebut selanjutnya dibina dan diberikan bantuan berupa pupuk dan bibit. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar 76.450.000. Capaian program P2L sangat bergantung pada kesediaan masyarakat dan juga kesediaan lahannya sehingga untuk kelurahan yang minim pekarangan lahan rumah masyarakat atau aktivitas perekonomian masyarakat yang dominan berdagang dan bekerja di sektor jasa akan susah untuk tercapai.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa dalam tataran pencapaian tujuan teknis program intervensi yang dilakukan oleh Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial, kesemuanya itu masih perlu upaya peningkatan.

Berbagai program intervensi dilakukan pada akhirnya ditujukan untuk menurunkan prevalensi stunting, masalah gizi tertangani dan masalah gizi dapat diintervensi sesegera mungkin. Dengan harapan akan semakin baiknya deteksi dini tumbuh kembang balita sehingga stunting dapat dicegah lebih awal. Angka prevalensi stunting di Kota Baubau berdasarkan data tahun 2021 adalah sebesar 27,6% dan kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 26%. Hal ini berarti bahwa meskipun penurunan angka prevalensi stunting belum signifikan, tetapi penurunan ini mengindikasikan bahwa program intervensi gizi sensitif yang dijalankan

oleh seluruh OPD yang terlibat sudah menunjukkan hasil. Dengan konsistensi maka ke depan penurunan angka prevalensi stunting ini akan semakin meningkat.

Terkait hal ini, Syahrir (2022) menjelaskan bahwa untuk menjadikan pencapaian tujuan sebagai ukuran efektivitas organisasi maka: pertama, organisasi harus memiliki tujuan akhir; kedua, tujuan harus didefinisikan dengan benar agar dapat dipahami; tujuan harus diminimalkan untuk memudahkan pengelolaan; dan ke empat, konsensus atau kesepakatan umum harus dicapai untuk tujuan ini. Terkait pencapaian tujuan ini, pemerintah Kota Baubau melalui Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Baubau dan kemudian lagi Peraturan Walikota Nomor 150 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sudah menetapkan tujuan yang jelas, didefinisikan dengan baik mulai dari program hingga PD penanggung jawab dan sudah disepakati bersama oleh semua OPD yang terlibat.

Secara umum tujuan program intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Baubau sudah menunjukkan progres penurunan sebesar 1% yakni dari 27,6% menjadi 26%. Persentase penurunan ini apabila disandingkan dengan indikator efektivitas pada Keputusan Menpan No. Kep./25/M/Men Pan/2/2004 bahwa besaran 90% - 100 % (efektif), 80% - 89 % (cukup efektif), 60% - 79% (kurang efektif) dan < 60% (tidak efektif) maka secara keseluruhan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting di Kota Baubau dikategorikan tidak efektif.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kasus baru stunting di Kota Baubau. Temuan ini memberikan arti bahwa intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat atau keluarga beresiko stunting dengan tujuan untuk meminimalisir atau sebagai tindakan pencegahan sejak dini terhadap resiko *stunting* telah tercapai dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa program intervensi gizi sensitif yang masih perlu ditingkatkan yaitu akses air minum dan sanitasi, kuota masyarakat penerima manfaat PKH, dan pembentukan kelompok masyarakat tani. Selain itu, perlu adanya upaya penguatan atau pemberdayaan aspek social ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok miskin dan rentang sehingga intervensi pencegahan yang *stunting* yang dilakukan dapat lebih baik lagi.

Berbagai program intervensi dilakukan pada akhirnya ditujukan untuk menurunkan prevalensi stunting, masalah gizi tertangani dan masalah gizi dapat diintervensi sesegera mungkin. Dengan harapan akan semakin baiknya deteksi dini tumbuh kembang balita sehingga stunting dapat dicegah lebih awal. Dan hingga tahun 2023 ini tidak terdapat penambahan kasus stunting di Baubau sehingga berbagai program intervensi yang dilakukan oleh semua OPD terkait dapat dikatakan efektif.

#### **4. Pemantauan Program**

Pemerintah Kota Baubau melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Baubau juga senantiasa melakukan pemantauan atas setiap capaian program untuk kemudian menjadi bahan evaluasi bersama. Namun demikian, islamy, dkk. (2023) menjelaskan bahwa kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Bappeda khususnya dalam penanganan stunting, Bappeda sebagai leading sector seharusnya tidak hanya melakukan kontrol dan monitoring melalui evaluasi laporan yang dilakukan setiap rapat-rapat koordinasi. Sebaliknya harus juga dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk memastikan kebenaran laporan yang disajikan tersebut.

Islamy, dkk. (2023) menjelaskan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan oleh organisasi lintas sektor yang menjadi implementor kebijakan dimana salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam jaringan atau kerja sama antar organisasi adalah koordinasi. Syahrir (2022) juga menjelaskan bahwa koordinasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mengorganisasikan diri secara bersama-sama dan memberikan informasi oleh beberapa pihak yang sederajat. Tetapi koordinasi ini kerap kali dicapai melalui sistem prosedur yang kompleks oleh kegiatan-kegiatan yang terpisah tetapi

berhubungan dimana komunikasi interaksional atau kolaborasi membutuhkan perintah formal atau sistem prosedural dan tidak berkembang secara spontan.

Pendapat di atas sangat tampak dalam pelaksanaan pemantauan program intervensi gizi sensitif yang dilakukan. OPD yang terlibat cenderung akan berkoordinasi hanya melalui kegiatan rapat-rapat yang harus diadakan secara tersistem. Belum tampak adanya upaya membangun koordinasi yang sifatnya lebih informal dan berkembang secara spontan sebagai bentuk kebutuhan akan informasi diantara para pihak yang terlibat. Selain itu, peneliti juga menilai bahwa perbedaan orientasi sasaran program dan kapasitas OPD dalam penanganan *stunting* menyebabkan adanya gap dalam pemantauan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di luar Dinas Kesehatan dan DPPKB, diketahui bahwa para OPD cenderung melakukan pemantauan hanya untuk mengawasi pelaksanaan program sebagaimana program rutin lainnya, tidak ada upaya lebih jauh untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan program tersebut oleh masyarakat dalam kaitannya dengan upaya percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, ada kecenderungan bahwa OPD lain seakan-akan kurang memperhatikan manfaat program tersebut dengan asumsi bahwa mereka hanya sebatas mendukung, tanggung jawab pokok terkait *stunting* melekat pada Dinas Kesehatan yang menaungi persoalan kesehatan dan DPPKB sebagai *leading sector* penanganan *stunting*.

Secara keseluruhan, pemantauan program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan *stunting* di Kota Baubau telah berjalan, baik dalam internal OPD terhadap programnya masing-masing, ataupun pemantauan lintas sektor antar OPD yang berperan dalam intervensi gizi sensitif. Pemantauan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk dengan membangun kolaborasi diantara *stakeholder*. Kegiatan pemantauan ini dilaporkan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Baubau setiap semester dalam tahun berjalan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pemantauan ini adalah upaya koordinasi informal lintas OPD untuk mempercepat akses dan pertukaran informasi. Pemantauan program juga perlu dilakukan tidak sebatas pada *output* program tetapi hingga *outcome* untuk melihat bagaimana program itu dimanfaatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat khususnya terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Kota Baubau melalui program intervensi gizi sensitif berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program disimpulkan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Kota Baubau mencegah terjadinya kasus *stunting* baru sebagaimana tujuan program intervensi gizi sensitif yang menjadi fokus penelitian ini yakni meminimalisir atau sebagai tindakan pencegahan sejak dini terhadap resiko *stunting*. Meskipun demikian, dari aspek capaian organisasi pelaksana program intervensi gizi sensitif masih terdapat beberapa program intervensi gizi sensitif yang masih perlu ditingkatkan yaitu akses air minum dan sanitasi, kuota masyarakat penerima manfaat PKH, dan pembentukan kelompok masyarakat tani. Selain itu, perlu ada penyamaan persepsi antar organisasi pemerintah daerah pelaksana program intervensi gizi sensitif mengenai sasaran program yang dilaksanakan. Juga perlu adanya upaya penguatan atau pemberdayaan aspek social ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok miskin dan rentang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Gibson, L.J. dkk, 2000, Organisasi, Terjemahan, Jakarta, Erlangga.

Hasnawati, Syahril Ramadhan, La Ode Syaiful Islamy H.

- Islamy, Andriani, Akhyar. (2023). Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting. Deepublish. Cv. Budi Utama
- Jones, Charles O.1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, L, J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Walikota Baubau Nomor Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Baubau
- Peraturan Baubau nomor 216 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Kota Baubau
- Peraturan Walikota Nomor 150 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- Sugiono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta
- Syahril R, 2022. Studi Organisasi dalam kehidupan publik. Deepublish. Cv. Budi Utama.